UNIVERSITAS GADJAH MADA
Pengaturan Kedudukan Hukum dan Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Terhadap Kebebasan Hakim Pengadilan Niaga dalam Menilai Pembuktian Sederhana atas Pengajuan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Apartemen (Studi Putusan Nomor 97/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt. Pst.)
Febby Aulia Dwi Sagita, Prof Dr. Hj. Rahayu, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2025 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ali, Achmad dan Wiwie Heryani, 2012, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Kencana, Jakarta.

Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum,* Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Anisah, Siti, 2008, *Perlindungan kepentingan Kreditor dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, Total Media, Yogyakarta.

Arikunto, Suharsimi, 2014, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta.

Arto, Mukti, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Ashafa, Burhan, 2004, *Metode Penelitian Hukum,* Rineka Cipta, Jakarta.

Asnawi, M. Natsir, 2014, *Hermeneutika Putusan Hakim*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta.

Christiawan, Rio, 2020, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Rajawali, Depok.

Darmadji, Tjiptono, 2001, *Restrukturisasi: Memulihkan dan Mengakselerasi Ekonomi Nasional*, Grasindo, Jakarta.

Gilang, Sri dan Zulfia Hanum, 2021, *Tingkat Kepatuhan dan Implementasi Terhadap Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Oleh Hakim di Pengadilan,* Kencana, Jakarta.

Ginting, Elyta Ras, 2018, *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Harahap, M. Yahya, 2007, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan,* Sinar Grafika, Jakarta.

_____., 1997, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Hardini, Sri, 2023, *Recht Pengantar Bahasa Belanda Untuk Studi Hukum,* Format Publishing, Deli Serdang.

Hartini, Rahayu, 2009, *Hukum Kepailitan*, Kencana, Jakarta.

Hutagalung, Sophar Maru, 2019, *Praktik Peradilan Perdata Kepailitan dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta.

Pengaturan Kedudukan Hukum dan Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Terhadap
Kebebasan Hakim Pengadilan Niaga dalam Menilai Pembuktian Sederhana atas Pengajuan Permohonan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Apartemen (Studi Putusan Nomor 97/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt. Pst.)
Febry Audrey Tagie, Prof. Dr. Tata Wijayanta, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2025 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Ibrahim, Jhony, 2006, *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.

Indrohartono, 1999, *Perbuatan Pemerintah Menurut Hukum Publik dan Hukum Perdata*, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Hukum Administrasi, Jakarta.

Jayadi, Dr. Hendri, 2021, *Buku Ajar Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Publika Global Media, Yogyakarta.

Manan, Bagir dan Kuntana Magnar, 1997, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, *Alumni*, Bandung.

Manan, Bagir, 2008, *Memulihkan Peradilan yang Berwibawa dan Dihormati: Pokok-Pokok Pikiran Bagir Manan dalam Rakernas*, Ikatan Hakim Indonesia, Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

_____., 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Kedelapan*, Liberty, Yogyakarta.

Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, 2004, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Mulyadi, Lilik, 1999, *Hukum Acara Perdata: Menurut Teori dan Praktik Peradilan*, Djambatan, Jakarta.

Muttaqien, Raisul, 2008, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Nusa Media, Bandung.

Nalle, Victor Imanuel W., 2013, *Konsep Uji Materiil Kajian Pembentukan dan Uji Materiil Peraturan Kebijakan di Indonesia*, Setara Press, Malang.

Pramono, Nindyo dan Sulatro, 2017, *Hukum Kepailitan dan Keadilan Pancasila, Kajian Filsafat Hukum atas Kepailitan Badan Hukum Perseroan Terbatas di Indonesia*, Penerbit Andi, Yogyakarta.

Rahardjo, Satjipto, 2014, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sarwono, 2018, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.

Simanjuntak, Ricardo, 2023, *Undang-Undang Kepailitan dan PKPU Indonesia Teori dan Praktik*, Kontan Publishing, Jakarta.

Sinaga, Syamsudin M., 2012, *Hukum Kepailitan Indonesia*, Tatanusa, Jakarta.

Sihombing, Januardo S.P., 2024, *Permasalahan Kasus Perkara PKPU dan Kepailitan*, Mitra Wacana Media, Jakarta.

Pengaturan Kedudukan Hukum dan Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Terhadap
Kebebasan Hakim Pengadilan Niaga dalam Menilai Pembuktian Sederhana atas Pengajuan Permohonan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Apartemen (Studi Putusan Nomor 97/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt. Pst.)
Febby Aulia Dwi Saputri, 2025 | Prof. Dr. Tata Wijayanta, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2025 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Sjahdeini, Sutan Remy, 2003, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Grafiti, Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat,* Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2012, *Penelitian Hukum Normatif,* Rajawali, Jakarta.

Soemitro, Ronny Hanitijo, 1994, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri,* Ghalia Indonesia, Jakarta.

Subekti, 1999, *Hukum Pembuktian,* Pradnya Paramita, Jakarta.

_____., 1977, *Hukum Acara Perdata,* Bina Cipta, Bandung.

Subhan, M. Hadi, 2008, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik Peradilan,* Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Sutedi, Adrian, 2010, *Hukum Rumah Susun dan Apartemen,* Sinar Grafika, Jakarta.

Suteki dan Galang Taufani, 2023, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik),* Raja Garfindo Persada, Depok.

Suyudi, Aria, Eryanto Nugroho dan Herni Sri Nurbayanti, 2004, *Kepailitan di Negeri Pailit,* Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1996, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Waluya, Bagja, 2007, *Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*, Grafindo Media Pratama, Bandung.

Wardah, Sri dan Bambang Sutiyoso, 2007, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia,* Gama Media, Yogyakarta.

Wibowo, Richo Andi, *et.al.,* 2024, *Hukum Administrasi Negara, Konsep, Fundamental, Perkembangan Kontemporer, dan Kasus,* Rajawali Pers, Depok.

Wijayanta, Tata, 2013, *Penyelesaian Kes Kebankrapan di Mahkamah Tinggi Malaysia dan Pengadilan Niaga di Indonesia*, Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) Kuala Lumpur, Malaysia.

Wijayanta, Tata, 2016, *Undang Undang dan Praktik Kepailitan: Perbandingan Indonesia dan Malaysia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Wijayanta, Tata dan Muhammad Bagas, 2021, *Cross Border Insolvency Kerjasama Lintas Batas Antar Lembaga Peradilan, Perbandingan Indonesia, Malaysia, dan Korea Selatan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Pengaturan Kedudukan Hukum dan Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Terhadap
Kebebasan Hakim Pengadilan Niaga dalam Menilai Pembuktian Sederhana atas Pengajuan Permohonan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Apartemen (Studi Putusan Nomor 97/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt. Pst.)
Fabby Aulia Devi Sagita, Prof. Dr. Tata Wijayanta, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2025 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Wijayanta, Tata dan Sheva Trisanda Adistia, 2023, *Balai Harta Peninggalan Sebagai Kurator Publik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Wijayanta, Tata, *et. al.*, 2024, *Akibat Pembatalan Perjanjian Perdamaian Perspektif Perlindungan Hukum terhadap Kreditor Konkuren dalam Pembagian Harta Pailit*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja, 1999, *Seri Hukum Bisnis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Jurnal

Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. "Kebebasan Hakim Perdata Dalam Penemuan Hukum dan Antinomi Dalam Penerapannya". *Jurnal Mimbar Hukum,* Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Vol, 23 No.1, Februari, 2011: hlm. 61-76.

Dewi, Putu Eka Trisna. "Karakteristik Khusus Pengadilan Niaga Dalam Mengadili Perkara Kepailitan". *Jurnal Hukum Saraswati*, Universitas Mahasaraswati Denpasar, Bali, Vol. 5 No. 1, Oktober, 2023: hlm. 322-338.

Fajarwati, Meirina. "Validitas Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan". *Jurnal Legislasi Indonesia*, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, Vol. 14 No. 2, Juni, 2017: hIm. 155-166.

Fasil, Maulana Ridho Al, *et. al.* "Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam Perspektif Akademisi: Kekuatan Hukum, Ketetapan dan Konsistensi, Pengaruh terhadap Putusan Hakim". *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Institut Ahmad Dahlan Probolinggo, Vol. 4 No. 2, Oktober, 2023: hIm. 230-240.

Kapoyos, Nelson. "Konsep Pembuktian Sederhana dalam Perkara Kepailitan Kajian Putusan Nomor 125 PK/PDT.SUS-PAILIT/2015". *Jurnal Yudisial*, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, Vol. 10 No. 3, Desember, 2017: hlm. 331-346.

Putriyanti, Erma Defiana dan Tata Wijayanta. "Kajian Hukum Tentang Penerapan Pembuktian Sederhana dalam Perkara Kepailitan Asuransi". *Jurnal Mimbar Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Vol. 22 No. 3, Oktober, 2010: hlm. 482-497.

Rahmawati, Aulia. "Hukum Apartemen Dalam Prakteknya di Indonesia". *Justitia Et Pax Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, Vol. 34 No. 1, Juni, 2018: hlm. 15-32.

Pengaturan Kedudukan Hukum dan Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Terhadap
Kebebasan Hakim Pengadilan Niaga dalam Menilai Pembuktian Sederhana atas Pengajuan Permohonan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Apartemen (Studi Putusan Nomor 97/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt. Pst.)
Febby Aulia Dwi Sagita, Prof. Dr. Tata Wijayanta, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2025 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Respationo, Soetya dan M. Gunzi Hamzah. "Putusan Hakim: Menuju Rasionalitas Hukum Refleksi dalam Penegakan Hukum". *Jurnal Hukum Yustisia,* Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Vol. 2 No. 2, Agustus, 2013: hlm. 101-107.

Risquanty Christiana Derita. "Akibat Hukum Kepailitan Bagi Pengcmbang Terhadap Pembeli (Konsumen) Satuan Rumah Susun (Apartemen)". *Journal Education and Development,* Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Vol. 10 No. 3, September, 2022: hlm. 34-38.

Sajidin, Syahrul. "Urgensi Penyederhanaan Agenda Sidang pada Hukum Acara Perdata di Indonesia". *Jurnal Hukum Acara Perdata,* Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, Vol. 4 No. 2, Desember, 2018: hlm. 21-41.

Santoso, Raihan Andhika, Elan Jaelani, dan Utang Rosidin. "Kedudukan dan Kekuatan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Hukum Positif Indonesia". *Jurnal Publikasi Ilmu Hukum,* Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, Vol. 1 No. 4, Desember, 2023: hlm. 7-15.

Sidabutar, Lambok Marisi Jakobus. "Hukum Kepailitan dalam Eksekusi Harta Benda Korporasi sebagai Pembayaran Uang Pengganti". *Jurnal Antikorupsi Integritas*, Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta, Vol. 5 No. 2, Desember, 2019: hlm. 75-81.

Sidharta, Iwan. "Pembuktian Sederhana dalam Putusan Pailit (Studi Kasus Perkara Nomor 515 K/Pdt.Sus/2016), *Jurnal Legal Reasoning,* Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jakarta, Vol. 1 No. 1, Desember, 2018: hlm. 36-47.

Slamet, Sri Redjeki dan Fitria Olivia. "Permohonan Kepailitan Atas Developer Apartemen Tidak Memenuhi Persyaratan Fakta Yang Terbukti Secara Sederhana Suatu Kajian Keadilan Dan Kepastian Hukum". *Lex Jurnalica,* Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta, Vol. 21 No. 1, April, 2024: hlm. 114-120.

Sufiarina, dan Efa Laela Fakhriah. "Kompetensi Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia". *Journal Masalah-Masalah Hukum,* Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, Vol. 43 No. 4, November, 2014: hlm. 569-576.

Sujitno. "Konflik Yurisdiksi antara Arbitrase dan Pengadilan Niaga". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum,* Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Vol. 9 No. 19, Februari, 2002: hlm. 29-50.

Wantu, Fence M. "Antinomi dalam Penegakan Hukum oleh Hakim". *Jurnal Mimbar Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Vol. 19 No. 3, Oktober, 2007: hlm. 335-485.

Wijayanta, Tata. "Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan-Putusan Kepailitan di Pengadilan Niaga", *Jurnal Dinamika Hukum*,

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Pengaturan Kedudukan Hukum dan Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Terhadap
Kebebasan Hakim Pengadilan Niaga dalam Menilai Pembuktian Sederhana atas Pengajuan Permohonan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Apartemen (Studi Putusan Nomor 97/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt. Pst.)
Fabby Aulia Dwi Saputra, Prof. Dr. Tata Wijayanta, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2025 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Banyumas, Vol. 14 No. 2, Mei, 2014: hlm. 216-226.

_____., "Kajian Tentang Pengaturan Syarat Kepailitan Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004". *Jurnal Mimbar Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Vol. 26 No. 1, Februari, 2014: hlm. 1-13.

_____., "Perkembangan Perbedaan Pendapat (Dissenting Opinion) dalam Putusan Kepailitan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat". *Jurnal Mimbar Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Vol. 19 No. 3, Oktober, 2007: hlm. 335-485.

_____., "Urgensi Pembentukan Pengadilan Niaga Baru", *Jurnal Mimbar Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Vol. 22 No. 2, Juni, 2010: hlm. 330-346.

Wijayanta, Tata dan Sheva Trisanda Adistia. "Development of The Heritage Center as Bankruptcy Curator". *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Vol. 11 No. 1, Maret, 2024: hlm. 1-18.

Wijayanta, Tata, *et. al.*, "Penerapan Prinsip Hakim Pasif dan Aktif serta Relevansinya Terhadap Konsep Kebenaran Formal". *Jurnal Mimbar Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Vol. 22 No. 3, Oktober, 2010: hlm. 572-587.

Wijayanta, Tata, *et. al.*, "Evaluation Study of the Chancery Court (Balai Harta Peninggalan) as a Bankruptcy Curator", *Pandecta Law Journal*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Semarang, Vol. 18 No. 2, Desember, 2023: hlm. 300-324.

Wijayanta, Tata, *et. al.*, "Should Indonesia Learn from Malaysia and Singapore's Cross-Border Insolvency Asset Settlements?", *Yustisia Jurnal Hukum*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Vol. 13 No. 1, April, 2024: hlm. 27-37.

Skripsi/Penulisan Hukum

Rafli, Mohammad Haykel, 2022, Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga No. 289/Pdt.Sus-Pkpu/2021/Pn. Niaga.Jkt.Pst Tentang Penerapan Prinsip Pembuktian Sederhana Dalam Permohonan PKPU PT Garuda Indonesia Tbk Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, *Skripsi*, Tidak dipublikasikan, Program Studi Sarjana Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung.

Tambunan, Bryan Ricardo Lamuel, 2024, Kepastian Hukum Bagi Konsumen Pembeli Unit Apartemen Akibat Terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Dalam Mengajukan Permohonan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran

Pengaturan Kedudukan Hukum dan Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Terhadap
Kebebasan Hakim Pengadilan Niaga dalam Menilai Pembuktian Sederhana atas Pengajuan Permohonan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Apartemen (Studi Putusan Nomor 97/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt. Pst.)
Hebby Athiah Dwi Saputra, Prof. Dr. Tata Wijayanta, S.H., M.Hum
Universitas Gadjah Mada, 2025 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Utang Terhadap Pengembang Apartemen, *Tesis*, Tidak dipublikasikan, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Gadjah Mada (Kampus Jakarta), Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Staatsblad* 1848 - 23).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443).

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Wawancara

Jamaslin James Purba, 2025, Pengaturan Kedudukan Hukum dan Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Terhadap Kebebasan Hakim Dalam Menilai Pembuktian Sederhana atas Pengajuan Permohonan Kepailitan dan PKPU Apartemen, *Wawancara*, Yogyakarta, 24 Februari.

Yusuf Pranowo, 2025, Pengaturan Kedudukan Hukum dan Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Terhadap Kebebasan Hakim Dalam Menilai Pembuktian Sederhana atas Pengajuan Permohonan Kepailitan dan PKPU Apartemen, *Wawancara*, Jakarta, 27 Februari.

Pengaturan Kedudukan Hukum dan Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Terhadap
Kebebasan Hakim Pengadilan Niaga dalam Menilai Pembuktian Sederhana atas Pengajuan Permohonan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Apartemen (Studi Putusan Nomor 97/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga
Jkt. Pst.)
Fabyan Adhi Dwi Sagita, Prof Dr. Tata Wijayanta, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2025 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 97/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt. Pst. dengan SHJ selaku Termohon melawan PT SGP selaku Pemohon dalam Perkara PKPU Apartemen Sky House-BSD.

Internet

Nursobah, Asep. "Inilah Rumusan Hukum Hasil Kesepakatan Pleno Kamar 2023", Newsletter Kepaniteraan Mahkamah Agung, [31/12/2023], https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/registry-news/2298-inilah-rumusan-hukum-hasil-kesepakatan-pleno-kamar-2023, [25/12/2024].

Lain-Lain

Universitas Gadjah Mada. 2024. "Pengukuhan Prof. Dr. Tata Wijayanta, S.H., M.Hum. (FH) dan Prof. Dr. Ir. Sri Rahayu, M.P. (FKT)." YouTube. [23/04/2024]. https://www.youtube.com/live/7x38VtSZCu4?si=WjMPcuDEkGBNlSYv, [17/03/2025].